

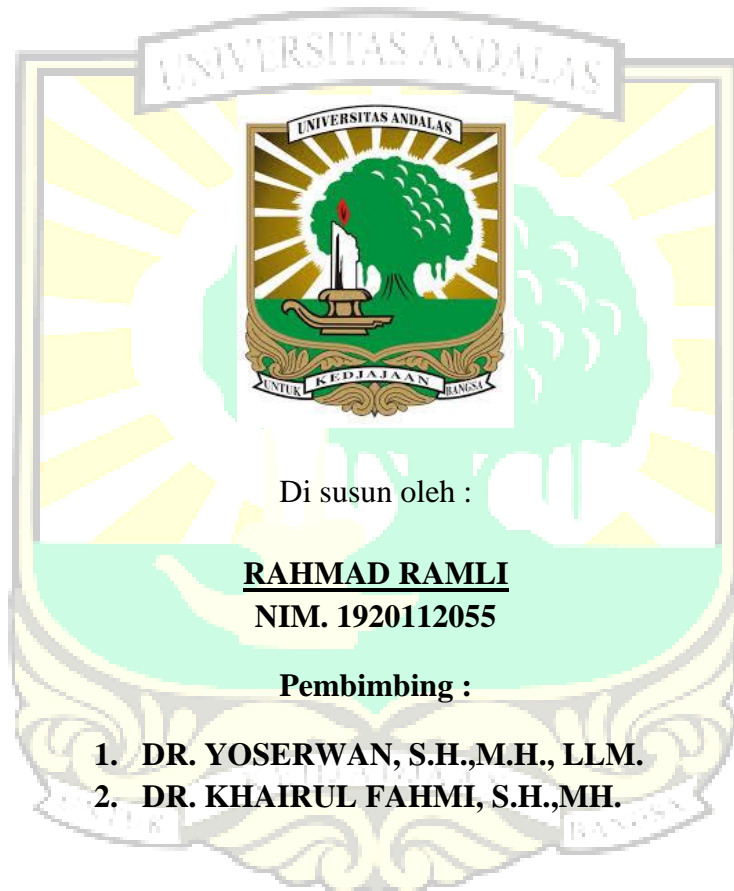
KEDUDUKAN BAWASLU DALAM PRAPERADILAN

TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM

*(Studi Kasus Praperadilan Tindak Pidana Pemilu Bawaslu Kota Solok
Register Nomor : 02/TM/PL/Kota/03.07/IV/2019)*

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Magister Ilmu Hukum*



Di susun oleh :

RAHMAD RAMLI
NIM. 1920112055

Pembimbing :

- 1. DR. YOSERWAN, S.H.,M.H., LL.M.**
- 2. DR. KHAIRUL FAHMI, S.H.,MH.**

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

KEDUDUKAN BAWASLU DALAM PRAPERADILAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM

**Rahmad Ramli, Nim 1920112055, Program Studi Magister Ilmu Hukum Pasca
Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2022, 108 Halaman**

ABSTRAK

Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggaraan Pemilu memiliki wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu, menerima laporan-laporan dugaan Pemilu, menangani dugaan pelanggaran pemilu, dan menindak lanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang. Setiap jenis pelanggaran pemilu memiliki substansi dan prosedur penanganan yang berbeda dalam penyelesaiannya. Khusus untuk pelanggaran tindak pidana pemilu proses penanganan pelanggaranannya diselesaikan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu. Penegakan hukum tindak pidana pemilu Sentra Gakkumdu tidak terlepas dari kemungkinan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti kasus praperadilan yang terjadi pada tanggal 15 Mei 2019 di Kota Solok. Joni Edison Nuis melalui kuasa hukumnya Veky Syamsir dan Dody Wisra mengajukan permohonan praperadilan terhadap Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok. Dari proses penyelidikan kemudian pemohon ditetapkan sebagai tersangka. Meskipun serangkaian tindakan yang menjadi wewenang praperadilan berupa penetapan tersangka dalam tindak pidana pemilihan umum adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik, namun faktanya permohonan praperadilan tindak pidana pemilu tetap juga ditujukan kepada Bawaslu. Tindakan yang dilakukan Joni Edison Nuis terhadap permohonan praperadilan yang ditujukan kepada Bawaslu Kota Solok tersebut menjadi persoalan terhadap kedudukan Bawaslu dalam permohonan praperadilan tindak pidana pemilu. Hal tersebut kemudian melatarbelakangi pertanyaan dalam penelitian tesis ini, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Bawaslu Kota Solok dalam penanganan tindak pidana pemilu di Sentra Gakkumdu;
2. Bagaimana kedudukan Bawaslu Kota Solok dalam praperadilan tindak pidana pemilu.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1. Kepolisian dalam melakukan penyidikan menjadikan kajian Bawaslu Kota Solok sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkaranya. Bawaslu secara institusi tidak diberikan peran dalam melakukan penetapan tersangka, tapi dari hasil kajian Bawaslu dapat dijadikan bahan bagi Kepolisian untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka 2. Kedudukan Bawaslu dalam praperadilan tindak pidana pemilu berada pada tahap awal pemeriksaan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu.

Kata Kunci : Bawaslu, Praperadilan, Tindak Pidana Pemilu.

**POSITION OF BAWASLU IN CRIMINAL ACTION PRETRIAL AT
GENERAL ELECTIONS**

**Rahmad Ramli, Nim 1920112055, Master of Law Study Program, Postgraduate
Faculty of Law, Andalas University, 2022, 108 Pages.**

ABSTRACT

Bawaslu (Election Supervisory Body) is one of the election organizers in Indonesia. Its powers include: supervising the implementation of the stages of the election, receiving and handling reports of alleged election violations, then following up on findings or reports of such violations, to the competent authority. Each type of violation in the implementation of the election has a different substance and handling procedure in its resolution. For violations of election crimes, the process of handling violations is completed through the Integrated Law Enforcement Center, hereinafter referred to as the Gakkumdu Center. The law enforcement of the election crime Sentra Gakkumdu cannot be separated from the possibility of committing acts that are contrary to the provisions of the applicable laws, such as the pretrial case that occurred on May 15, 2019 in Solok City. Joni Edison Nuis through his attorneys VekySyamsir and DodyWisra filed a pretrial application against the Solok City General Election Supervisory Agency. Based on the results of the investigation process, the applicant was later named a suspect. In this case, although a series of actions under the pretrial authority in the form of determining suspects in general election crimes are actions taken by investigators, in fact the application for pretrial election crimes is still addressed to Bawaslu. The actions taken by Joni Edison Nuis against the pretrial application addressed to the Solok City Bawaslu, then became a problem with the position of Bawaslu in the pretrial application for election crimes. This is the background of the questions in this thesis research, namely: 1. How is the implementation of the Solok City Bawaslu function in handling election crimes at the Gakkumdu Center; 2. What is the position of the Solok City Bawaslu in the pretrial for election crimes. This research is an empirical legal research. That is a legal research method that uses empirical facts, which are taken from human behavior. Both verbal behavior obtained from interviews, as well as real behavior through direct observation. Based on the results of the study, it can be concluded that: 1. In conducting the investigation, the Police made the Solok City Bawaslu study an integral part of the case file. While institutionally, Bawaslu is not given a role in determining suspects. But based on the results of the study, Bawaslu can be a reference for the Police to determine someone as a suspect. 2. The position of Bawaslu in the pretrial of election crimes is in the early stages of examining the handling of election criminal offenses.

Keywords : Bawaslu, Pretrial, Election Criminal